

BAB II

GAMBARAN SOSIAL POLITIK KOTA SEMARANG

Bab ini menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan gambaran umum fokus penelitian mengenai politik informal melalui DPRD dengan pemetaan daerah pemilihan. Penulis berusaha memaparkan gambaran singkat mengenai politik informal yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan pemetaan daerah pemilihan, khususnya di Kota Semarang, serta menjelaskan bagaimana interaksi sosial dan budaya lokal memengaruhi dinamika politik tersebut. Dalam konteks ini, penulis juga menyoroti pentingnya pemetaan daerah pemilihan sebagai alat untuk memastikan representasi yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat disampaikan secara efektif melalui anggota DPRD yang terpilih. Dengan demikian, bab ini memberikan wawasan mengenai hubungan antara politik informal serta peran penting yang dimainkan oleh pemetaan dapil untuk memperkuat keterlibatan politik di masyarakat.

Sesuai dengan bab ini, interaksi antara faktor-faktor politik informal dalam konteks masyarakat Semarang. Politik informal berperan dalam meningkatkan partisipasi warga, sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi sebagai wakil yang mengesahkan aspirasi tersebut dalam bentuk kebijakan. Dengan adanya pemetaan enam daerah pemilihan umum, KPU memastikan bahwa setiap suara dihitung secara adil, memberikan representasi yang beragam dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat. Hal ini menciptakan dinamika yang memperkuat keterlibatan sosial dan politik dalam pembangunan daerah.

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Ibu kota Jawa Tengah berada di kota Semarang, yang telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Kota Semarang telah ditunjuk sebagai pusat pemerintahan provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km yang lokasinya berbatasan langsung dengan kabupaten Kendal di sebelah barat, kabupaten Semarang di sebelah Selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur, dan laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis Pantai berkisar 13,6 km. Kemajuan pembangunan Kota Semarang sebagai kota metropolitan telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan memfasilitasi mobilitas masyarakat. Perkembangan dan pertumbuhan yang cepat di Kota Semarang telah memberikan dampak besar pada pola pikir dan modernisasi semua aktivitas masyarakat.

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi di Pulau Jawa, dengan letak geografis antara garis $6^{\circ} 50'$ - $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 35'$ - $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Suhu Udara

Kota Semarang, yang memiliki posisi geografis yang strategis, berfungsi sebagai pondasi pembangunan di Jawa Tengah dengan empat simpul pintu gerbang, yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Peran Semarang sangat krusial dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, terutama berkat keberadaan pelabuhan yang mendukung jaringan transportasi laut, serta jaringan transportasi darat seperti jalur kereta api dan jalan raya. Selain itu, Kota Semarang juga dilengkapi dengan fasilitas transportasi udara melalui bandara yang menjadi potensi penting bagi titik transportasi di Jawa Tengah.

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Secara administratif, Kota Semarang terbagi menjadi 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Wilayah-wilayah kecamatan ini memiliki ukuran luas yang berbeda-beda, dua kecamatan yang memiliki luas terluas dan terkecil. Kecamatan Mijen memiliki luas wilayah sebesar 57,55 km², terletak di bagian selatan dan merupakan area perbukitan yang masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan Kecamatan Gunungpati memiliki luas wilayah sebesar 54,11 km², juga terletak di bagian selatan. Sementara wilayah kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah 6,14 km². Keduanya merupakan daerah-daerah pusat kota yang juga berfungsi sebagai pusat perekonomian Kota Semarang. Oleh karena itu, sebagian besar wilayah mereka banyak terdapat bangunan bersejarah, seperti Kawasan

Simpang Lima, Kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar, dan sekitarnya yang dikenal dengan “Kota Lama” Semarang. Tabel 2.1.2 berikut ini merupakan luas wilayah Kota Semarang dan luas masing-masing per kecamatan yang ada di Kota Semarang:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah di Kota Semarang

NO	Kecamatan	Luas Wilayah km ²
1.	Mijen	56,52
2.	Gunung Pati	58,27
3.	Banyumanik	29,74
4.	Gajah Mungkur	9,34
5.	Semarang Selatan	5,95
6.	Candisari	6,40
7.	Tembalang	39,47
8.	Pedurungan	21,11
9.	Genuk	25,98
10.	Gayamsari	6,22
11.	Semarang Timur	5,42
12.	Semarang Utara	11,39
13.	Semarang Tengah	5,17
14.	Semarang Barat	21,68
15.	Tugu	28,13
16.	Ngaliyan	42,99
	JUMLAH	373,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, diolah 2022

Semua kecamatan Kota Semarang memiliki luas wilayah yang berbeda, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2.1.2 Kecamatan Mijen memiliki presentase terbesar dengan 15,4% dari wilayah Kota Semarang, sedangkan Kecamatan Semarang Selatan

memiliki presentase terkecil dengan hanya 1,64%. Perbedaan luas wilayah ini berdampak pada bagaimana infrastruktur dan pengelolaan sumber daya dibutuhkan di masing-masing kecamatan. Kecamatan dengan wilayah yang lebih luas, seperti Mijen, membutuhkan perhatian lebih pada pengelolaan lahan dan aksesibilitas, sementara kecamatan yang lebih kecil, seperti Semarang Selatan, mungkin lebih berkonsentrasi pada meningkatkan fasilitas publik yang mendukung kepadatan penduduk yang tinggi.

2.2 Gambaran Umum Politik Informal Sosio Kultural

Politik informal adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-kultural. Memahami dimensi sosio kultural dalam politik informal sangat penting untuk menganalisis dinamika politik dalam suatu masyarakat. Politik informal merupakan jaringan relasi dan interaksi sosial di luar struktur formal pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, dan struktur sosial masyarakat. Karakteristiknya yang fleksibel, personal, dan seringkali berbasis konsensus membuat politik informal menjadi bagian integral dari kehidupan politik di banyak masyarakat. Politik informal dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan mempermudah penyelesaian masalah di tingkat lokal. Faktor-faktor dari adanya sosio kultural seperti agama, sejarah, dan budaya politik memainkan peran penting dalam membentuk dinamika politik informal.

Politik informal melalui pendekatan sosio kultural merujuk pada praktik dan interaksi yang terjadi di luar struktur formal dalam sistem politik, dengan penekanan

pada pengaruh budaya dan konteks sosial dalam membentuk dinamika politik. Pendekatan ini fokus pada bagaimana faktor-faktor lokal, seperti tradisi, norma-norma, dan hubungan antarindividu, memengaruhi interaksi antara legislator dan masyarakat. Dalam kerangka ini, politik tidak hanya dipahami sebagai serangkaian proses kelembagaan atau prosedural, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi sosial, jaringan personal, dan nilai-nilai budaya yang memandu perilaku individu dan kelompok. Pendekatan sosio kultural ini menekankan pentingnya norma-norma sosial dan hubungan personal dalam pembentukan serta pelaksanaan kekuasaan politik di luar jalur formal.

2.3 Demografi Kota Semarang

Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.708,83 jiwa, dengan luas wilayah sekitar 373,70 km², yang menghasilkan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 4.500 jiwa per km². Dari segi komposisi etnis, mayoritas penduduk merupakan suku Jawa, yang mencakup sebagian besar total populasi, diikuti oleh suku Tionghoa, dan berbagai suku lainnya seperti Arab, Melayu, Sunda, Batak, dan Minangkabau. Bahasa yang umum digunakan dalam komunikasi sehari-hari adalah Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia, mencerminkan keberagaman budaya yang hidup berdampingan di kota ini. Dari segi keagamaan, sebagian besar penduduk Semarang menganut agama Islam, yang menjadi identitas keagamaan yang utama. Ada juga komunitas Kristen, terdiri dari Protestan dan Katolik, yang juga memainkan peran

penting dalam kehidupan sosial dan budaya Kota Semarang. Di antara banyaknya penduduk di Kota Semarang, ada sebagian kecil yang menganut agama Buddha dan Hindu. Sebagian kecil penduduk lainnya menganut kepercayaan Konghucu dan tradisional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang pada tahun 2023 mencapai 84,43. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,35 dari tahun sebelumnya yakni sebesar 84,08 pada tahun 2022 yang menunjukkan tingkat kualitas hidup relatif baik. IPM yang tinggi ini mencerminkan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi bagi masyarakat. Secara keseluruhan, data-data ini mencerminkan dinamika sosial dan budaya Kota Semarang sebagai salah satu pusat pertumbuhan yang modern namun tetap kaya akan warisan tradisi di Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang, jumlah penduduk Kota Semarang periode 2022-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) Periode 2022 - 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin			
	Laki - Laki		Perempuan	
	2022 - 2023		2022 – 2023	
Mijen	42.908	44.876	42.910	45.072
Gunung Pati	49.341	50.310	49.333	50.442

Banyumanik	69.717	70.675	71.602	72.758
Gajah Mungkur	27.204	27.602	28.286	28.748
Semarang Selatan	29.744	30.215	31.468	31.964
Candisari	36.709	37.302	37.752	38.312
Tembalang	96.306	98.833	97.174	100.029
Pedurungan	95.667	97.167	97.458	99.359
Genuk	64.514	66.946	64.182	65.527
Gayamsari	34.421	34.998	34.913	35.411
Semarang Timur	31.729	32.261	33.698	34.220
Semarang Utara	57.341	58.194	58.713	59.693
Semarang Tengah	26.002	26.438	28.336	28.775
Semarang Barat	72.102	73.311	74.813	76.015
Tugu	16.575	16.906	16.504	16.889
Ngaliyan	71.025	72.403	71.528	73.092
Kota Semarang	821.305	838.437	838.670	856.306

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2022-2023

Kecamatan yang memiliki penduduk yang banyak di Kota Semarang adalah kecamatan Tembalang, Pedurungan, Banyumanik, Semarang Barat, Ngaliyan, Genuk, dan Semarang Utara. Kecamatan tersebut memiliki penduduk yang lebih dari 50.000 dimana kecamatan ini memiliki suara terbesar di Kota Semarang. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Tugu.

2.4 Kondisi Sosial Politik Kota Semarang

Keanekaragaman budaya, kemajuan ekonomi, dan struktur politik yang stabil membentuk karakteristik sosial politik Kota Semarang. Semarang adalah kota yang sangat beragam dari segi sosial. Orang-orang dari berbagai etnis hidup berdampingan seperti Jawa, Tionghoa, dan Arab, serta orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia. Keberagaman ini menciptakan suasana sosial yang ramah dan terbuka terhadap perbedaan. Secara politik, stabilitas sosial yang stabil menghasilkan lingkungan politik yang aman dan produktif. Masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi dapat menyampaikan aspirasi mereka melalui kehadiran DPRD Kota Semarang. DPRD bekerja sama dengan pemerintah kota untuk membuat kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pengelolaan lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan program *smart city* yang meningkatkan layanan publik dengan teknologi. Teknologi baru dapat meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat, yang menghasilkan stabilitas politik. Semarang adalah kota yang menarik untuk investasi karena karakteristik sosial politiknya yang kuat. Stabilitas politik dihasilkan dari kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, bersama dengan peran DPRD yang aktif, memastikan pembangunan yang lancar dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses politik.

PDI Perjuangan (PDIP) adalah partai yang paling dominan di DPRD Kota Semarang, dengan 14 kursi setelah pemilu legislatif 2024. Dengan konfigurasi ini, PDIP memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan DPRD mengenai kebijakan

pembangunan, penganggaran, dan berbagai masalah sosial politik di Semarang. Namun, partai-partai lain tetap berperan dalam menciptakan dinamika demokratis di DPRD melalui pengawasan dan partisipasi dalam diskusi kebijakan. Secara sosiologis, pola hubungan sosial politik di masyarakat Kota Semarang dipengaruhi oleh dominasi PDI Perjuangan (PDIP) di DPRD Kota Semarang. PDIP adalah partai nasionalis dengan basis pemilih perkotaan yang kuat, yang memberikan stabilitas politik dan mendorong solidaritas sosial. Kehadiran PDIP yang kuat dalam pemerintahan membantu mengurangi perselisihan politik dan memungkinkan pembuatan kebijakan yang lebih konsisten.

Partisipasi aktif masyarakat dalam politik, termasuk mendukung atau menentang kebijakan PDIP dan partai lain, dapat mendorong kehidupan sosial yang dinamis dan sehat secara demokratis. Partai politik di Semarang, termasuk PDIP, memanfaatkan dukungan masyarakat ini melalui program-program sosial dan pembangunan, yang mempererat interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat peran sosial lembaga politik dalam menjaga kedamaian sosial.

2.5 Gambaran Umum Anggota DPRD

Demokrasi memungkinkan orang untuk menyuarakan keinginan mereka. Namun, media untuk menyampaikan aspirasi ini terkadang masih terbatas. Sebagai lembaga perwakilan daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah wakil

rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum untuk duduk di lembaga legislatif di tingkat daerah, baik di provinsi maupun kabupaten atau kota di Indonesia. Salah satu tanggung jawab utama mereka adalah melakukan tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran di tingkat daerah dengan tujuan membuat kebijakan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat daerah yang mereka wakili. Dengan menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka, anggota Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan dapat menyuarakan keinginan rakyat, memperjuangkan kepentingan daerah, dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi yang mewakili keinginan rakyat. Terpilihnya anggota DPRD dalam pemilihan legislatif dengan melalui berbagai proses seperti melakukan pendaftaran calon oleh pimpinan partai politik, melakukan kampanye, penyusunan daftar pilih, dan partisipasi dari pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Semarang periode 2024–2029 terdiri dari 50 orang yang dipilih melalui Pemilihan Umum Legislatif (Pilkada) 2024. Partai Politik dan Jumlah Kursi di Kota Semarang yakni PDIP, memiliki kursi terbanyak dengan total 14 kursi. Gerindra, mendapat 7 kursi. PKS dan Demokrat, Setiap partai mendapatkan 6 kursi. PKB dan PSI, Setiap partai mendapatkan 5 kursi. Partai Golkar, Memperoleh empat kursi. PAN, PPP, Nasdem, Masing-masing partai mendapatkan satu kursi. Masing-masing anggota DPRD dari setiap Dapil ini memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi

legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan daerah pemilihan anggota DPRD. Selain itu anggota DPRD juga harus mengemban tugas mengawal kebijakan dan aspirasi masyarakat setempat, sehingga kebijakan daerah dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan kebutuhan rakyat.

2.6 Pemetaan Dapil Kota Semarang

Kota Semarang memiliki enam daerah pemilihan dalam pemilu legislatif untuk memilih calon anggota DPRD Kota Semarang. Pemetaan daerah pemilihan (dapil) legislatif Kota Semarang untuk periode 2019-2024 melibatkan pembagian wilayah untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu anggota DPRD Kota Semarang dapat dilihat dari tabel 2.5 berikut:

Tabel 2. 3 Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kota Semarang

No	Daerah Pemilihan	Kecamatan
1.	Dapil Kota Semarang 1	Semarang Barat, Semarang Selatan
2.	Dapil Kota Semarang 2	Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah
3.	Dapil Kota Semarang 3	Gayamsari, Pedurungan, Genuk
4.	Dapil Kota Semarang 4	Tembalang, Candisari

5.	Dapil Kota Semarang 5	Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur
6.	Dapil Kota Semarang 6	Mijen, Ngaliyan, Tugu

Sumber: Buku Pemilu 2019 KPU Kota Semarang

KPU Kota Semarang menetapkan daerah pemilihan Kota Semarang menjadi enam daerah pemilihan yakni Dapil 1 terdiri dari Semarang Barat dan Semarang Selatan. Dapil 2 terdiri dari Semarang Timur, Semarang Utara, dan Semarang Tengah. Dapil 3 terdiri dari Gayamsari, Pedurungan, dan Genuk. Dapil 4 terdiri dari Tembalang dan Candisari. Dapil 5 terdiri dari Gunungpati, Banyumanik, dan Gajahmungkur. Dapil 6 terdiri dari Mijen, Ngaliyan, dan Tugu.

Daftar anggota DPRD ini mencakup wakil rakyat dari berbagai daerah pemilihan (Dapil) dan partai politik. Di Dapil 1 perwakilan terdiri dari Syahrul Qirom (PKB), Joko Santoso (Gerindra), Trivena Weyatin Soehendro dan Michael dari PDIP, Siti Roika (PKS), Swasti Aswagati (Demokrat), dan Melly Pangestu (PSI). Dapil 2 diwakili oleh Sodri (PKB), Nunung Sriyanto dan Dinda Ari Ayu Isnani dari Gerindra, serta Hanik Khoiru Solikah, Adi Subkhan Ifana, dan Rahmulyo Adiwibowo dari PDIP. Dapil ini juga diwakili oleh Cahyo Adhi Widodo (Golkar), Moh Rodhi (Nasdem), Ali Umar Dhani (PKS), Sugi Hartono (Demokrat), Benediktus Narendra Keswara (PSI), dan Hasan Bisri (PPP). Sementara itu, Dapil 3 memiliki perwakilan Syaiful Bahri (PKB), Herlambang Prabowo (Gerindra), Lely Purwandari dan Bambang Sri Wibowo

dari PDIP, Mararas Apuwara (Golkar), Dini Inayati (PKS), Danur Rispriyanti (Demokrat), dan F. Tika Mantofany (PSI).

Selanjutnya untuk Dapil 4 terdapat Febri Soemarmo (PKB), D Tunjung P (Gerindra), Giyanto, V. Djoko Riyanto, dan Yosi Yonardo Garneda Rendra Putera dari PDIP, diikuti Anang Budi Utomo (Golkar), Agus Riyanto Slamet (PKS), Suciati (Demokrat), dan Aisyah Firdausa (PSI). Dapil 5 diwakili oleh Ma'ruf (PKB), Mualim (Gerindra), Kadar Lusman dan R Yuwanto dari PDIP, Suharsono (PKS), Wachid Nurmiyanto (PAN), dan Maftukah Wiwin Subiyono (Demokrat). Terakhir, Dapil 6 memiliki anggota DPRD Abdul Majid (Gerindra), Rukiyanto Arif Budiman dan Joko Susilo dari PDIP, Erry Sadewo (Golkar), Joko Widodo (PKS), Wahyoe Winarto alias Liluk (Demokrat), dan Irwan Loekita Wiharto Karunia (PSI). Salah satu bagian penting dari proses demokrasi yang memungkinkan representasi masyarakat yang lebih baik adalah pemetaan dapil legislatif Kota Semarang untuk periode 2019-2024. Pembagian dapil yang jelas memudahkan proses pemilu dan memastikan bahwa suara setiap warga dihitung dengan adil.